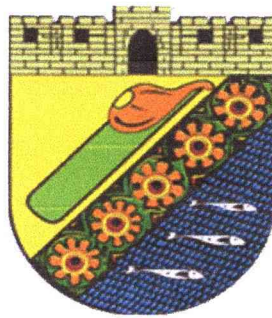


**RENCANA STRATEGIS
RENSTRA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2021**

DINDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN



EXECUTIVE SUMMARY

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah merampungkan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu Tahun 2021-2026 hal ini dikarenakan adanya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan No. 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Rasa syukur ini patut kami panjatkan, mengingat di tengah kesibukan tugas pokok dan rutin yang harus kami emban dalam memberikan pelayanan kependudukan bagi masyarakat Kota Pekalongan, kami mengerahkan tenaga, pikiran, energi, waktu, dan sumber daya lainnya, sehingga RENSTRA ini dapat terselesaikan tepat waktu.

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan bentuk komitmen konkret Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam mengejawantahkan perencanaan strategis untuk lima tahunan unit kerja atau instansi sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya

Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang akan dijadikan bahan dalam penyusunan RPJMD.

Demikian RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ini telah tersusun dan kami sajikan, dengan harapan semoga kiranya dapat digunakan sebagai bahan acuan sekaligus pula monitoring dan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi peningkatan kinerja di masa mendatang dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat di bidang kependudukan di wilayah Kota Pekalongan.

Akhirnya semoga karya dan dharma bakti kita dapat menjadi amal kebaikan kepada Allah SWT, aamiin.

Pekalongan, 24 September 2021
Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pekalongan



Drs. MUADI, M.Si
NIP 19651212 198603 1019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
EXECUTIVE SUMMARY	<i>ii</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang	<i>1</i>
1.2 Landasan Hukum	<i>5</i>
1.3 Maksud dan Tujuan	<i>9</i>
1.4 Sistematika Penyusunan	<i>10</i>
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	<i>14</i>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	<i>14</i>
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	<i>22</i>
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<i>29</i>
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	<i>47</i>
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	<i>50</i>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	<i>50</i>
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala	<i>51</i>

	Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Instansi Terkait	58
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	61
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	61
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	63
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	63
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
5.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	70
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII	PENUTUP	76
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan didasarkan pada :

1. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informas Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Hasil desk Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda Kota Pekalongan, menyangkut cascading kinerja dan ;
5. Penambahan kegiatan baru akibat dari kebijakan Pusat dan Provinsi serta dalam kerangka percepatan capaian program pada renstra.

Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan instrumen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, dan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional hasil kesepakatan lembaga eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, bertanggung jawab membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Pekalongan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota khususnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dokumen Kependudukan yang berisi indikator dan target capaian pelayanan dokumen kependudukan, memudahkan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang sesuai dengan rencana pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana batas waktu yang ditetapkan secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, yang dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil untuk periode 1 tahun.

Walaupun telah ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

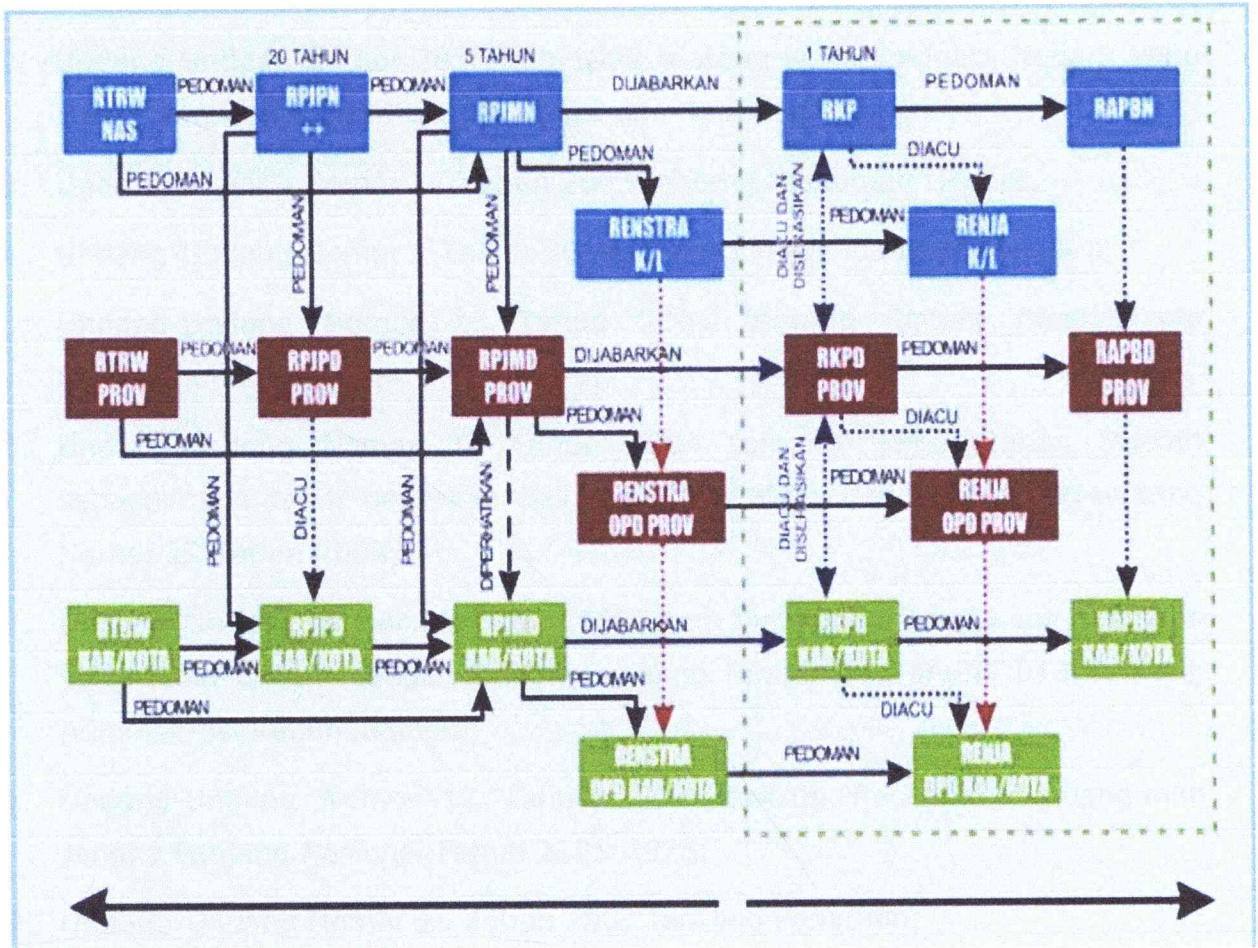
Sipil adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan berdasarkan pasal 18 ayat (2) yang berbunyi Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga sejak tahun 2017 SPM tersebut diatas bukan merupakan kewajiban bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Akan tetapi SPM tetap menjadi acuan dalam penilaian Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan dalam perencanaan.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (1) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (2) Bagaimana mencapainya; dan (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Hubungan antar dokumen dapat digambarkan melalui alur proses bisnis di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
38. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan;
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan;

44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
49. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
50. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
51. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
52. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
58. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021 -2026 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan untuk memberikan arah dan kebijakan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dituang dalam bentuk pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Atas dasar itu maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021 -2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Pekalongan;
3. Mempermudah pengendalian dan pengawasan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 -2026 dapat tercapai;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021 -2026 sebagai berikut :

I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Instansi Terkait

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan dalam bentuk mitigasi risiko

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana

dihasilkan dari analisis yang telah dilakukan (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

VII. INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII. PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai simpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan No. 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan selaku Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan selaku Perangkat Daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan Kebijakan Walikota.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. pengkoordinasian program dan anggaran;
- b. pengkoordinasian pengelolaan keuangan;
- c. pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang aset;
- d. pengkoordinasian urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pengkoordinasian perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pengkoordinasian pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pengkoordinasian pelayanan pencatatan sipil;
- i. pengkoordinasian pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. pengkoordinasian kerjasama administrasi kependudukan;

- k. pengkoordinasian pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. pengkoordinasian inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. pengkoordinasian kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

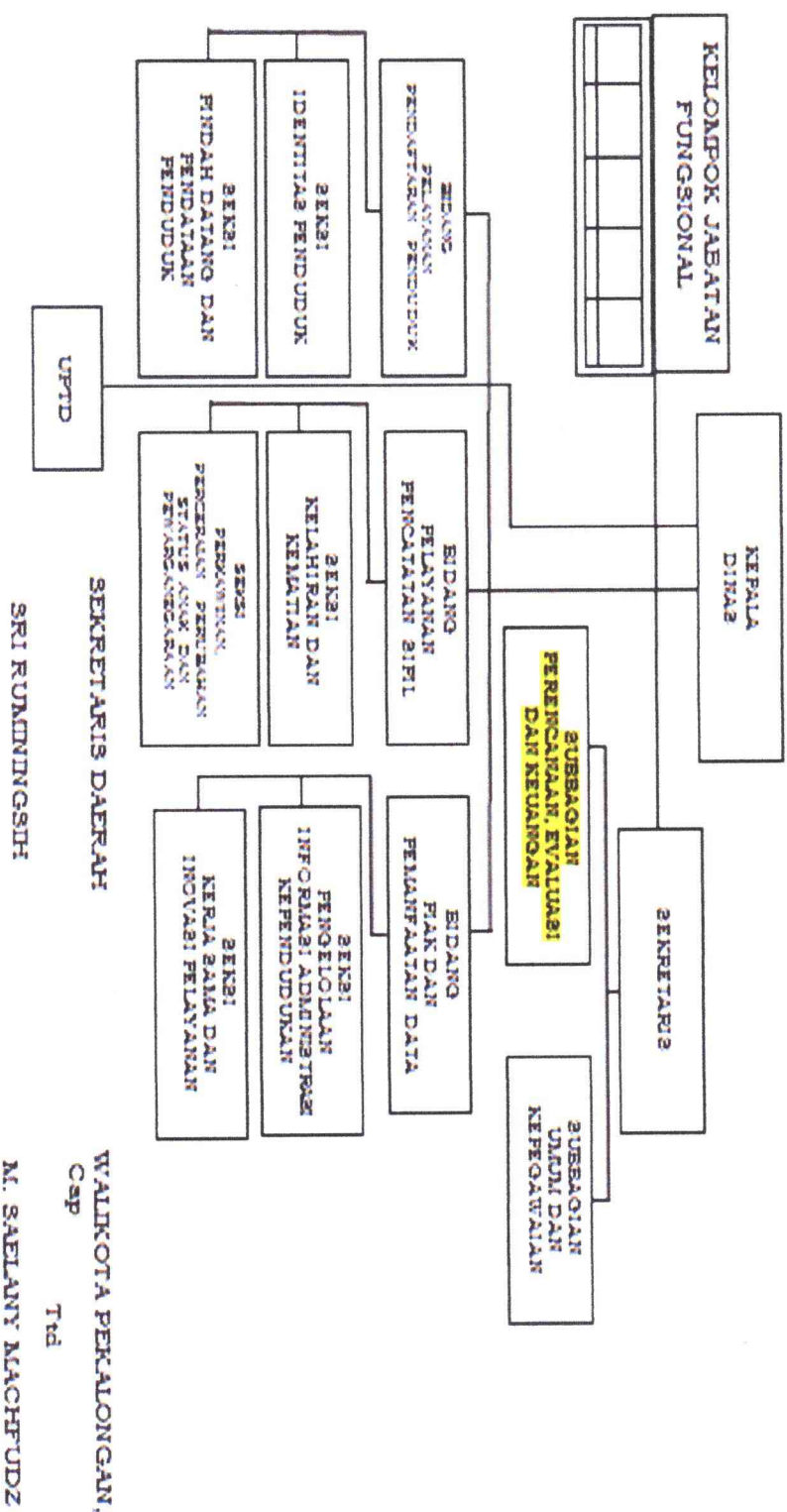
2. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk sebagai pelaksana teknis dibidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan Kebijakan Walikota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan No. 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang digambarkan dalam bentuk bagan organisasi berikut ini:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKALONGAN**

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan



Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari ;
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Eselonering jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
Eselon II.b
- b. Sekretaris Dinas
Eselon III.a

=
=

- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Eselon III.b =
- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Eselon III.b =
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data = Eselon III.b
- f. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan = Eselon IV.a
- g. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Eselon IV.a =
- h. Kepala Seksi Identitas Penduduk Eselon IV.a =
- i. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Eselon IV.a =
- j. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Eselon IV.a =
- k. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan = Eselon IV.a
- l. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan = Eselon IV.a
- m. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Eselon IV.a =

Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan No. 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

Adapun uraian ringkas mengenai tugas dan fungsi masing-masing unit eselon dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan.

Adapun Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian program dan anggaran;
- b. pengkoordinasian pengelolaan keuangan;
- c. pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang aset;
- d. pengkoordinasian urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pengkoordinasian perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pengkoordinasian pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pengkoordinasian pelayanan pencatatan sipil;
- i. pengkoordinasian pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. pengkoordinasian kerjasama administrasi kependudukan;
- k. pengkoordinasian pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. pengkoordinasian inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. pengkoordinasian kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif meliputi perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan Aparatur Sipil Negara, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, perlengkapan dan

kearsipan. Adapun Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang aset;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan administrasi kependudukan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Standar Pelayanan (SP).
- g. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pengkoordinasian pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pengkoordinasian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pengkoordinasian pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- h. perencanaan pelaksanaan penerapan dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendaftaran penduduk;
- i. perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- k pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil., Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pengkoordinasian pelayanan pencatatan sipil;
- e. pengkoordinasian penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pengkoordinasian pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- h. perencanaan pelaksanaan penerapan dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pencatatan Sipil;
- i. perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengkordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan pengelolaan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen

- kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. pengkoordinasian pengelolaan pendokumentasian administrasi kependudukan;
 - g. perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
 - h. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan didukung oleh personil sebanyak 22 orang PNS dan 1 tenaga kontrak dengan SK Walikota Pekalongan (data per 31 Desember 2020) dengan rincian sebagai berikut :

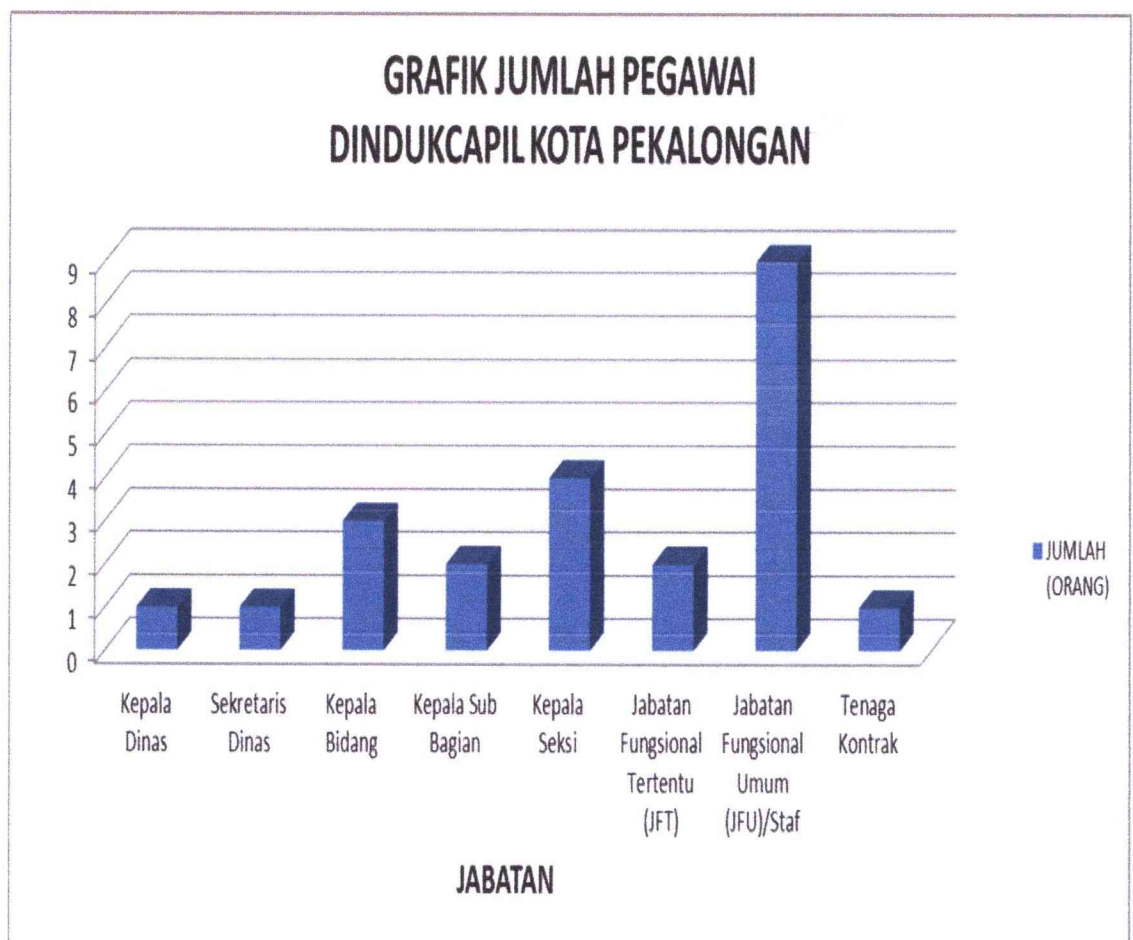
a. Perincian Berdasarkan Jumlah Pegawai

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai DINDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Kepala Seksi	4
6	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	2
7	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Staf	9
8	Tenaga Kontrak	1
Jumlah		23

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, bulan Desember tahun 2020

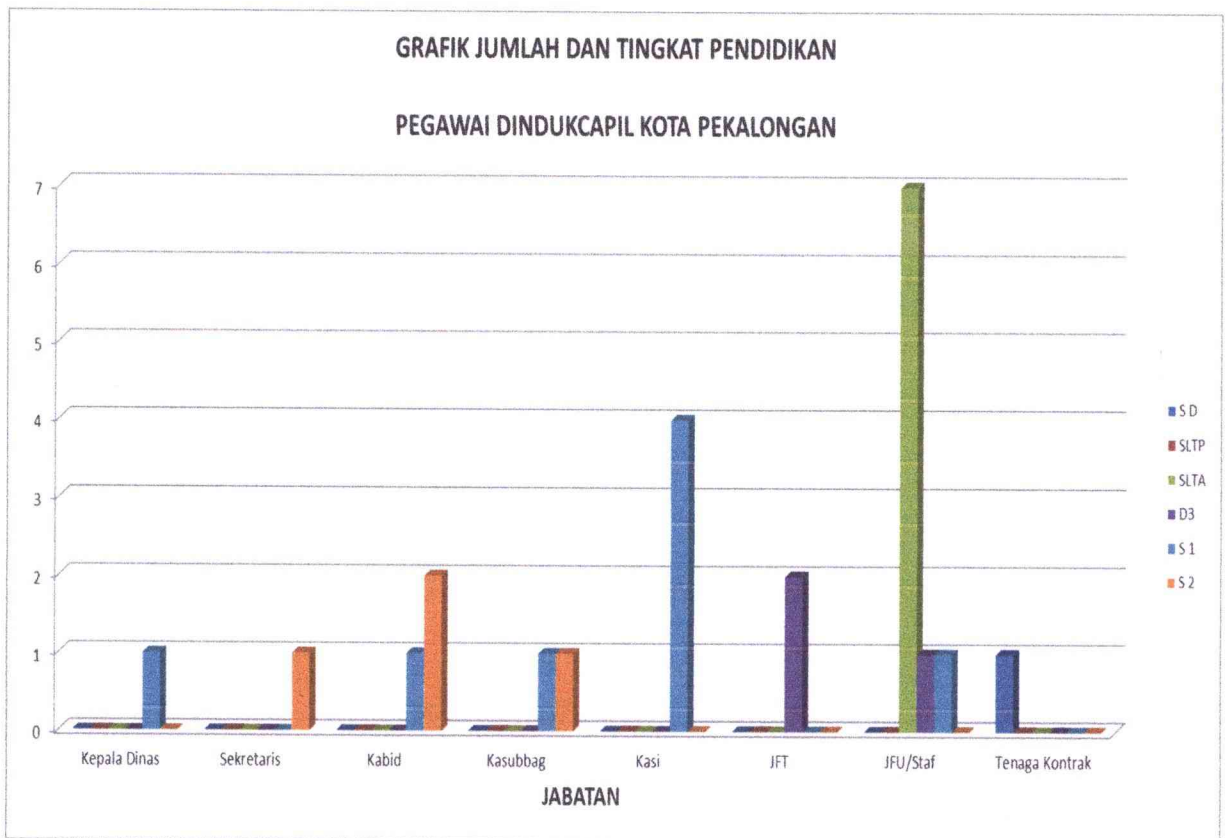


b. Perincian Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2
Jumlah dan Tingkat Pendidikan
Pegawai DINDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	-	-	-	-	1	2	3
4	Kasubbag	-	-	-	-	1	1	2
5	Kasi	-	-	-	-	4	-	4
6	JFT	-	-	-	2	-	-	2
7	JFU/Staf	-	-	7	1	1	-	9
8	Tenaga Kontrak	1	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	1	0	7	3	8	4	23

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, bulan Desember tahun 2020



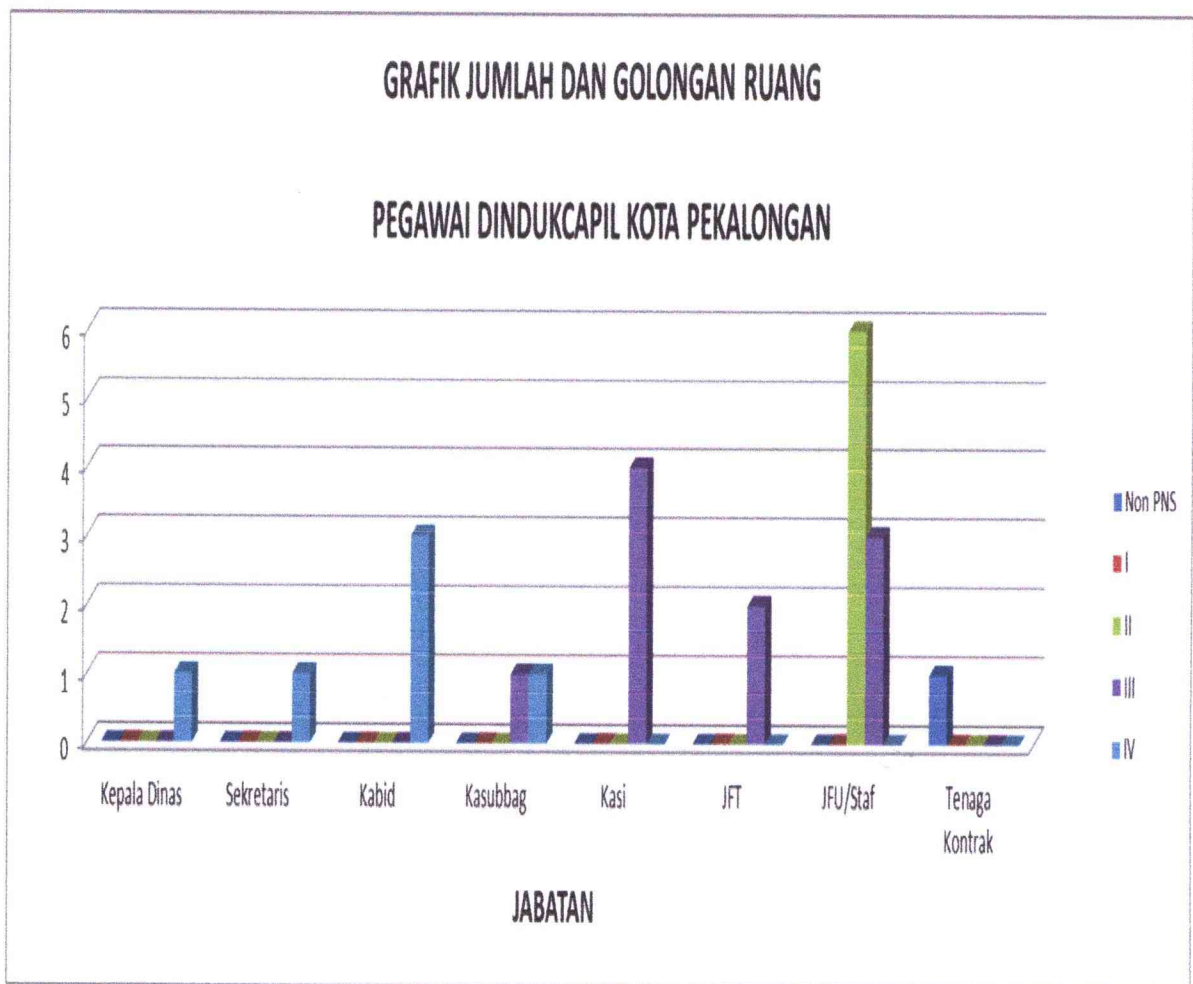
c. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.3
Jumlah dan Golongan Ruang
Pegawai DINDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN	Non PNS	GOL. RUANG				JUMLAH
			I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	-	-	-	-	3	3
4	Kasubbag	-	-	-	1	1	2
5	Kasi	-	-	-	4	-	4
6	JFT	-	-	-	2	-	2

7	JFU/Staf	-	-	6	3	-	9
8	Tenaga Kontrak	1	-	-	-	-	1
Jumlah		1	0	6	10	6	23

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, bulan Desember tahun 2020



d. Perincian Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.4

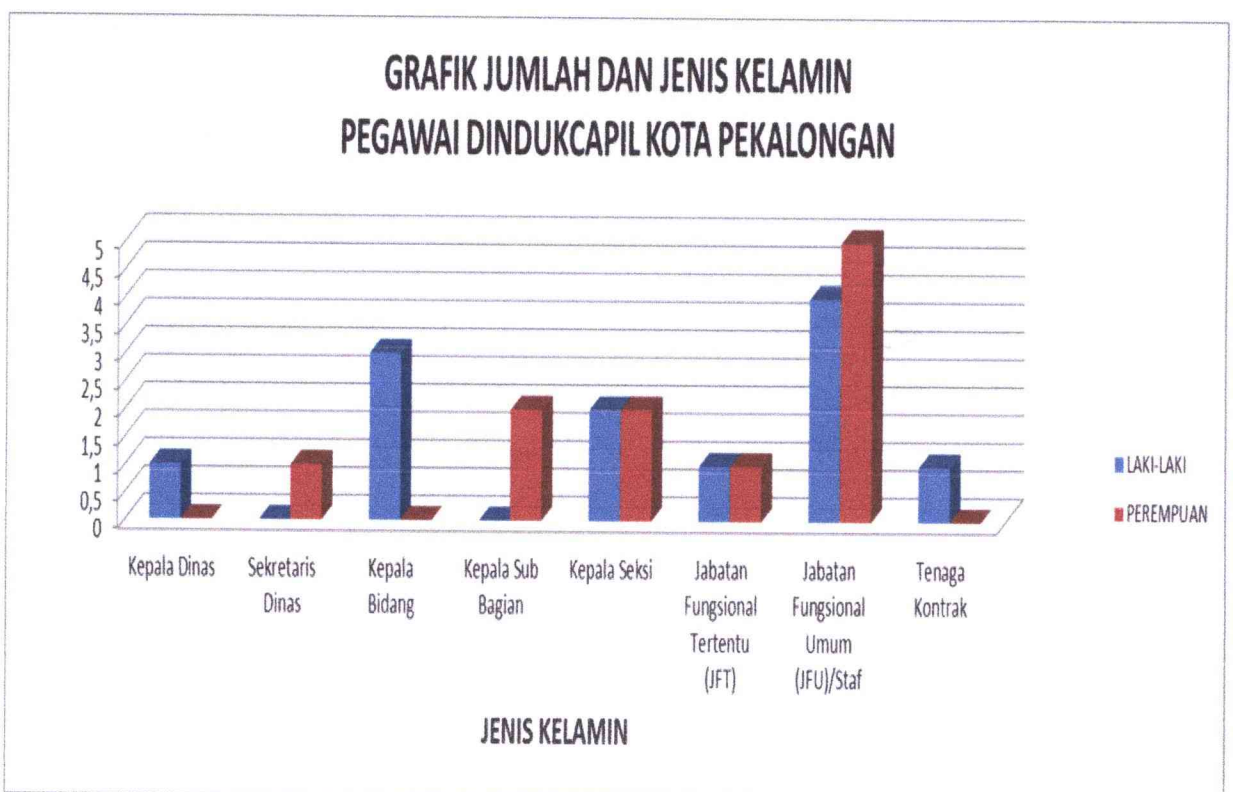
Jumlah dan Jenis Kelamin

Pegawai DINDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala Dinas	1	-	1

2	Sekretaris Dinas	-	1	1
3	Kepala Bidang	3	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	2	2
5	Kepala Seksi	2	2	4
6	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	1	1	2
7	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Staf	4	5	9
8	Tenaga Kontrak	1	-	1
Jumlah		12	11	23

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, bulan Desember tahun 2020



2. Sarana Dan Prasarana Kantor

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan memiliki Sarana dan Prasarana. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana

telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dindikcapil Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana
DINDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Komputer	18 unit
2.	Monitor	10 unit
3.	Printer	30 unit
4.	Notebook / Laptop	8 unit
5.	LCD Proyektor	1 unit
6.	Mesin Ketik	2 unit
7.	AC	27 unit
8.	Televisi	2 unit
9.	Sound System	2 unit
10.	Filling Cabinet	9 unit
11.	Kendaraan Roda 4	3 unit
12.	Kendaraan Roda 2	13 unit
13.	Ruang Rapat	1 unit
14.	Server	2 unit

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, bulan Desember tahun 2020

Sarana dan prasarana yang tersedia tersebut diatas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Dindikcapil Kota Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun sebelumnya dapat dilihat dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Tabel 2.6
Evaluasi Capaian Target Indikator Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

N o.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Realisasi Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Usuran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
1	OPD yang memanfaatkan data kependudukan	perangkat daerah	-	9	13	-	1	1,00	1,00	26,00	belum tercapai
2	Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan	pemangku kepentingan	-	26	26	-	26	26,00	52,00	78,00	akan tercapai
	- Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan	bulan		12		12	12	12	48	60	akan tercapai
	- Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	kali		525		203	232	193	1.138	2.288	belum tercapai
	- Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)	buku		150		171	167	171	1.003	1.115	akan tercapai
	- Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)	berkas		7.500		8.550	8.350	8.550	50.150	55.750	akan tercapai
	- Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannya	buku		100		27	80	27	457	650	belum tercapai
3	Cakupan penerbitan KK	%	-	97,00	97,50	-	91,27	93,14	93,14	98,00	akan tercapai
4	Cakupan penerbitan KTP	%	-	93,00	94,00	-	97,76	97,73	97,73	95,00	tercapai

-	Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan	orang		120		120		120		120		240		360	akan tercapai
-	Jumlah kepemilikan KTP-el	KTP		249.427		229.698		225.252		227.268		227.268		252.000	akan tercapai
-	Jumlah Kepemilikan KK	KK		97.594		99.623		90.925		100.130		100.130		98.500	akan tercapai
-	Jumlah kepemilikan KIA	KIA		86.627		86.446		32.902		38.267		38.267		88.000	belum tercapai
5	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	%		73,00	74,00	55,00	52,14	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	75,00	belum tercapai	
6	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	%		70,00	75,00	-	75,94	80,87	80,87	80,87	80,87	80,00	80,00	tercapai	
-	Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	Akta Kelahiran		313.365		313.970		163.719		167.061		167.061		322.000	belum tercapai
-	Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian	Akta Kematian		11.081		13.172		9.495		12.722		12.722		11.400	tercapai
Program Rutin															
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan pengandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan		12		12		12		12		60		72	akan tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12		12		12		12		60		72	akan tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan		12		12		12		12		60		72	akan tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan perawatan kebersihan kantor	bulan		12		12		12		12		60		72	akan tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan		12		12		12		12		60		72	akan tercapai

-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan		12		12		12		12		60		72		akan tercapai	
-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan		12		12		12		12		60		72		akan tercapai	
-	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan		12		12		12		12		60		72		akan tercapai	
-	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan		12		12		12		12		60		72		akan tercapai	
-	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan		12		11		12		11		59		72		akan tercapai	
-	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali		75		75		83		36		284		390		belum tercapai	
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan Kantor dan rumah tangga	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		tercapai	
-		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit		4		4		4		4		4		4		tercapai
-		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit		15		16		15		16		16		15		tercapai
-		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit		55		45		55		50		220		280		akan tercapai
-		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan		12		12		12		12		60		72		akan tercapai
3		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen		100,00		5,00		100,00		100,00		100,00		100,00		tercapai
-	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen		6				6		6		26		32		akan tercapai	
-	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen		6				6		6		27		33		akan tercapai	

-	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	bulan				12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	36	akan tercapai
-	Jumlah dokumen SPP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen				5	5	5	5	5	5	5	15	akan tercapai			
4	Pengaduan yang diterima	kasus	-	-	0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tercapai			
-	Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	orang/bulan				1	1	1	1	1	1	1	1	tercapai			
-	Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan	bulan				12	12	12	12	12	12	24	36	akan tercapai			

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pendapatan	3.000	3.600	0	1.500	0	1.500	0	900	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600	-300
2	Belanja	7.496.674	5.126.616	5.881.360	6.063.138	5.299.665	7.261.497	4.746.680	5.347.991	5.548.411	4.570.949	96,86	92,59	90,93	91,51	86,25	-439.402	-538.110
	Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan)	2.119.924	2.308.816	2.466.610	2.672.264	2.667.477	2.038.632	2.201.500	2.227.389	2.509.792	2.203.774	96,17	95,35	90,30	93,92	82,62	109.511	33.028
	Belanja langsung	5.376.750	2.817.800	3.414.750	3.390.874	2.632.188	5.222.865	2.545.180	3.120.602	3.038.619	2.367.175	97,14	90,33	91,39	89,61	89,93	-548.912	-571.138

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan (Belanja Langsung)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	BELANJA LANGSUNG	5.376.750.000	2.817.800.000	3.414.750.000	3.390.874.000	2.632.188.000	5.204.859.280	2.545.179.906	3.120.602.150	3.038.619.399	2.367.175.609	96,80	90,33	91,39	89,61	89,93	-548.912.400,00	-567.536.734,20		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	438.987.000	524.795.000	852.563.000	635.100.000	485.514.000	410.288.840	483.697.131	790.942.102	603.075.578	450.593.022	93,46	92,17	92,77	94,96	92,81	9.305.400,00	8.060.836,40		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.650.000	2.400.000	2.640.000	2.400.000	2.400.000	3.648.777	2.023.290	2.582.400	2.276.000	2.266.500	99,97	84,30	97,82	94,83	94,44	-250.000,00	-276.455,40		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65.700.000	96.720.000	147.000.000	95.000.000	95.000.000	55.284.263	76.912.718	102.132.743	89.890.129	85.163.629	84,15	79,52	69,48	94,62	89,65	5.860.000,00	5.975.873,20		

3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.250.000	41.200.000	41.200.000	54.400.000	53.601.000	39.250.000	36.648.000	38.056.200	47.550.800	52.150.000	97,52	88,95	92,37	87,41	97,29	2.670.200,00	2.580.000,00
4	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	13.200.000	14.400.000	28.800.000	28.800.000	33.600.000	13.200.000	14.400.000	28.800.000	28.800.000	33.600.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.080.000,00	4.080.000,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	78.775.000	79.775.000	400.000.000	241.000.000	155.913.000	78.345.100	79.535.700	396.263.116	235.282.145	140.127.900	99,45	99,70	99,07	95,26	89,88	15.427.600,00	12.356.660,00
6	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	61.742.000	78.800.000	50.423.000	50.000.000	50.000.000	59.705.400	78.666.442	46.092.200	48.680.500	47.774.900	96,70	99,83	91,41	97,36	95,55	-2.348.400,00	-2.386.100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.692.500	1.426.000	815.500	2.498.000	1.048.000	42,31	57,04	32,62	99,92	83,84	-550.000,00	-128.900,00
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	7.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.864.500	5.955.500	6.000.000	5.989.500	5.956.500	78,19	99,26	100,00	99,83	99,28	-300.000,00	18.400,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.641.500	2.415.500	2.422.500	2.235.000	1.980.000	88,05	60,39	60,56	55,88	49,50	200.000,00	-132.300,00

10	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	33.750.000	27.854.000	37.613.700	43.253.000	41.118.000	32.774.000	79,58	83,59	96,12	91,37	97,11	-250.000,00	984.000,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	126.170.000	154.000.000	125.000.000	100.000.000	50.000.000	122.802.800	148.100.281	124.524.443	98.755.504	47.751.593	97,33	96,17	99,62	98,76	95,50	-15.234.000,00	-15.010.241,40	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.615.966.000	425.109.000	552.416.000	616.490.000	368.348.000	3.570.006.618	394.099.402	491.179.393	547.386.062	312.792.214	98,73	92,71	88,91	88,79	84,92	-649.523.600,00	-651.442.880,80	
13	Pembangunan gedung kantor	3.350.000.000	0	0	0	0	3.342.533.000	0	0	0	0	0	99,78	0	0	0	0	-670.000.000,00	-668.506.600,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	41.000.000	65.821.000	50.000.000	37.500.000	50.000.000	23.656.000	64.005.000	47.285.000	30.910.000	43.430.600	57,70	97,24	94,57	82,43	86,88	1.800.000,00	3.964.920,00	
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.866.000	46.308.000	47.316.000	45.300.000	43.598.000	31.224.699	30.275.312	35.358.593	29.487.652	24.558.314	68,08	65,38	74,73	65,09	56,33	-453.600,00	-1.333.277,00	
16	Pemeliharaan rutin/berkala meubelur	4.500.000	0	0	0	0	4.485.500	0	0	0	0	99,68	0	0	0	0	-900.000,00	-897.100,00	
17	Penyusunan Detail Engineering	15.000.000	0	0	0	0	14.714.000	0	0	0	0	98,09	0	0	0	0	-3.000.000,00	-2.942.800,00	

18	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	136.300.000	287.980.000	430.100.000	513.690.000	254.750.000	131.939.919	277.780.730	390.329.400	473.305.210	231.817.800	96,80	96,46	90,75	92,14	91,00	23.690.000,00	19.975.576,20
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	23.300.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	21.453.500	22.038.360	18.206.400	13.683.200	12.985.500	92,08	88,15	72,83	68,42	64,93	-660.000,00	-1.693.600,00
III	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000	23.500.000	26.000.000	26.000.000	19.500.000	24.750.000	21.296.200	23.904.000	24.507.000	17.280.000	82,50	90,62	91,94	94,26	88,62	-2.100.000,00	-1.494.000,00
21	Penyusunan Renta dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.875.000	6.306.950	6.801.000	7.580.000	7.091.000	88,75	78,82	86,01	94,75	88,64	-400.000,00	-356.800,00
22	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.475.000	7.901.750	7.799.000	7.907.000	7.550.000	84,75	98,77	97,49	98,84	94,38	-400.000,00	-156.000,00

23	Penyusunan renstra	10.000.000	7.500.000	0	0	0	7.400.000	7.088.500	0	0	0	74,00	94,51	0	0	0	-2.000.000,00	-1.480.000,00
	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	9.304.000	9.020.000	0	0	0	93,04	90,20	0	0,00	0,00
	Monitoring Dan Evaluasi Perangkat Daerah	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	2.639.000	0	0	0	0	75,40	700.000,00	527.800,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPM)	34.705.000	864.940.000	944.411.000	1.068.984.000	1.118.117.000	32.494.672	729.924.273	828.699.655	876.500.059	971.085.123	93,63	84,39	87,75	81,99	86,85	216.682.400,00	187.718.090,20
24	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	21.705.000	24.300.000	26.007.000	27.740.000	31.640.000	21.704.672	23.466.460	26.004.000	27.737.600	31.484.469	100,00	96,57	99,99	99,99	99,51	1.987.000,00	1.955.959,40
25	Promosi Kegiatan unggulan dan inovatif	13.000.000	13.000.000	20.000.000	10.000.000	0	10.790.000	12.910.000	19.867.500	10.000.000	0	83,00	99,31	99,34	100,00	0	-2.600.000,00	-2.158.000,00
	Audit Dan Surveillance Iso	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	33.936.000	0	0	0	0	96,96	0	0,00	0,00
38	Pelaksanaan Administrasi Keperudukan (DAK)	0	827.640.000	898.404.000	996.244.000	1.086.477.000	0	693.547.813	782.818.155	804.826.459	939.600.654	0	83,80	87,13	80,79	86,48	217.295.400,00	187.920.130,80

V	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	663.152.000	244.516.000	216.900.000	215.000.000	67.089.000	580.813.700	207.591.000	196.892.000	189.212.200	64.480.000	87,58	84,90	90,78	88,01	96,11	-119.212.600,00	-103.266.740,00
27	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	24.275.000	88.816.000	101.000.000	65.000.000	27.150.000	20.700.000	76.765.000	87.982.000	47.472.200	25.750.000	85,27	86,43	87,11	73,03	94,84	575.000,00	1.010.000,00
29	Pemeliharaan Data Kependudukan	69.700.000	67.700.000	50.000.000	50.000.000	39.939.000	46.445.800	45.750.000	44.910.000	47.745.000	38.730.000	66,64	67,58	89,82	95,49	96,97	-5.952.200,00	-1.543.160,00
32	Sosialisasi/Perjuangan Administrasi Kependudukan	91.950.000	88.000.000	65.900.000	100.000.000	0	70.000.000	85.076.000	64.000.000	93.995.000	0	76,13	96,68	97,12	94,00	0	-18.390.000,00	-14.000.000,00
30	Permutakhiran laporan pemeliharaan database kependudukan	385.302.000	0	0	0	0	361.042.900	0	0	0	0	93,70	0	0	0	0	-77.060.400,00	-72.208.580,00
36	Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91.925.000	0	0	0	0	82.625.000	0	0	0	0	89,88	0	0	0	0	-18.385.000,00	-16.525.000,00

VI	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	392.820.000	475.000.000	573.910.000	581.222.000	342.712.000	388.900.000	456.709.950	550.379.000	555.710.000	325.600.250	99,00	96,15	95,90	95,61	95,01	-10.021.600,00	-12.659.950,00
31	Kelengkapan Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	197.800.000	225.000.000	208.010.000	203.000.000	66.440.000	196.160.000	219.140.000	202.250.000	191.650.000	61.050.000	99,17	97,40	97,23	94,41	91,89	-26.272.000,00	-27.022.000,00
35	Penerapan elektronik KTP	195.020.000	250.000.000	261.500.000	259.322.000	227.922.000	192.740.000	237.569.950	249.624.000	257.025.000	221.822.000	98,83	95,03	95,46	99,11	97,32	6.580.400,00	5.316.400,00
38	Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	0	0	104.400.000	118.900.000	48.350.000	0	0	98.505.000	107.035.000	42.728.250	0	0	94,35	90,02	88,37	9.670.000,00	8.545.650,00
VII	PROGRAM PENCAIATAN SIPIL	201.120.000	259.940.000	248.550.000	248.078.000	230.908.000	197.605.450	251.861.950	238.616.000	242.228.500	225.345.000	98,25	96,89	96,00	97,64	97,59	5.957.800,00	5.547.910,00
26	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun updating dan pereliharaan)	166.320.000	218.240.000	230.000.000	228.078.000	230.908.000	163.900.000	210.411.950	220.266.000	224.161.000	225.345.000	98,54	96,41	95,77	98,28	97,59	12.917.600,00	12.289.000,00
28	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	34.800.000	41.700.000	18.550.000	20.000.000	0	33.705.450	41.450.000	18.350.000	18.067.500	0	96,85	99,40	98,92	90,34	0	-6.960.000,00	-6.741.090,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada visi dan misi Walikota Pekalongan sesuai yang tertera dalam RPJMD 2016-2021. Juga berpedoman pada kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Disebabkan RPJMD mengalami Perubahan pada Tahun 2018, maka Renstra Dindukcapil pun mengalami perubahan menyesuaikan perubahan RPJMD. Yaitu Renstra Perubahan Kedua Dindukcapil Tahun 2016-2021. Pada Renstra Perubahan Kedua tersebut, terdapat Cascading untuk memetakan Program dan Kegiatan agar setiap Pejabat Struktural mengampu minimal satu kegiatan. Dan hal ini berpengaruh pada susunan Program dan Kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Demikian juga mempengaruhi evaluasi setiap indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan cascading tersebut.

Dari Tabel 2.6 diatas dapat dijelaskan analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, sebagai berikut :

I. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Indikator : OPD yang memanfaatkan data kependudukan, capaian akhir merupakan akumulasi dari capaian tahun sebelumnya, pada tahun 2019 OPD yang memanfaatkan data kependudukan berjumlah 1 (satu) OPD, yaitu RSUD Benda Kota Pekalongan, hingga tahun 2020 masih satu OPD tersebut.
2. Indikator : Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan, capaian pada tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing tahun mencapai 26 Stakeholder.

Indikator 1 dan 2 adalah merupakan indicator Program : Penataan Administrasi Kependudukan.

3. Indikator : Cakupan penerbitan KK, capaian tahun 2019 sebesar 91,27% dan tahun 2020 sebesar 93,14%.

Cakupan penerbitan KK merupakan hasil dari :

$$\frac{\text{jumlah KK yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)}} \times 100\%$$

✓ Tahun 2019 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) =

$$\frac{90.925}{99.623} \times 100\% = 91,27\%$$

✓ Tahun 2020 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) =

$$\frac{92.887}{99.729} \times 100\% = 93,14\%$$

4. Indikator : Cakupan penerbitan KTP, capaian tahun 2019 sebesar 97,76% dan tahun 2020 sebesar 97,73%.

Cakupan penerbitan KTP merupakan hasil dari :

$$\frac{\text{jumlah KTP-el yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{jumlah wajib KTP elektronik pada tahun (x)}} \times 100\%$$

✓ Tahun 2019 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) =

$$\frac{225.252}{230.411} \times 100\% = 97,76\%$$

✓ Tahun 2020 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) =

$$\frac{227.268}{232.540} \times 100\% = 97,73\%$$

Indikator 3 dan 4 adalah merupakan indicator Program : Pendaftaran Penduduk

5. Indikator : Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran, capaian tahun 2019 sebesar 52,14% dan tahun 2020 sebesar 53,81%.

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran merupakan hasil dari :

$$\frac{\text{jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan s/d tahun (x)}}{\text{jumlah kelahiran yang terjadi s/d tahun (x)}} \times 100\%$$

✓ Tahun 2019 Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran =

$$\frac{163.719}{313.970} \times 100\% = 52,14\%$$

✓ Tahun 2020 Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran =

$$\frac{170.118}{316.119} \times 100\% = 53,81\%$$

6. Indikator : Cakupan penerbitan kutipan akta kematian, capaian tahun 2019 sebesar 75,94% dan tahun 2020 sebesar 80,87%.

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran merupakan hasil dari :

$$\frac{\text{jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan s/d tahun (x)}}{\text{jumlah kematian yang terjadi s/d tahun (x)}} \times 100\%$$

✓ Tahun 2019 Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian =

$$\frac{9.495}{12.503} \times 100\% = 75,94\%$$

✓ Tahun 2020 Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian =

$$\frac{12.722}{15.723} \times 100\% = 80,91\%$$

Indikator 5 dan 6 adalah merupakan indicator Program : Pencatatan Sipil

7. Realisasi capaian kinerja OPD yang memanfaatkan data kependudukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masih belum ada peningkatan.

Apabila realisasi capaian Renstra hingga tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka kemungkinan indikator ini belum bisa tercapai hingga masa akhir Renstra.

8. Realisasi capaian kinerja Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Apabila realisasi capaian Renstra hingga tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka kemungkinan indikator ini akan tercapai hingga masa akhir Renstra.

9. Realisasi capaian kinerja penduduk yang memiliki KK tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanding dengan realisasi kinerja prosentase Cakupan penerbitan KK.
Apabila realisasi capaian Renstra hingga tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka kemungkinan indikator ini akan tercapai hingga masa akhir Renstra.
10. Realisasi capaian kinerja penduduk yang memiliki KTP tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan berbanding terbalik dengan realisasi kinerja prosentase Cakupan penerbitan KTP, dalam hal ini disebabkan meningkatnya jumlah wajib KTP yang lebih besar daripada meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki KTP.
Apabila realisasi capaian Renstra hingga tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka indikator ini sudah tercapai hingga masa akhir Renstra.
11. Realisasi capaian kinerja penduduk yang memiliki kutipan Akta Kelahiran tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanding dengan realisasi kinerja prosentase Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran.
Apabila realisasi capaian Renstra hingga tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka kemungkinan indikator ini belum bisa tercapai hingga masa akhir Renstra.
12. Realisasi capaian kinerja penduduk yang memiliki kutipan Akta kematian tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanding dengan realisasi kinerja prosentase Cakupan penerbitan kutipan akta kematian.
Apabila realisasi capaian Renstra hingga tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka indikator ini sudah tercapai hingga masa akhir Renstra.

II. Program Rutin

Realisasi capaian kinerja untuk Program Rutin rata-rata capaiannya 100%.

Pencapaian kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sesuai target Renstra Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 diatas.

Dari Tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan analisis kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Belanja Langsung) selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar Rp. 17.632.362.000,- (Tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.294.441.000,- (Enam belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 92,41%.
2. Tren rasio antara realisasi dan anggaran untuk Total Belanja dari tahun 2016 hingga 2020 rata-rata 91,63%, di awal tahun anggaran 96,86% menurun sempat menaik pada th 2019 lalu menurun menjadi 86,25%. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, namun dikarenakan adanya pandemic covid 19 maka terjadi sedikit penurunan pada akhir tahun anggaran 2020, menjadi 86,25%. Namun hal ini tidaklah signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) dan Belanja Langsung (program dan kegiatan).
3. Sementara dari sisi pendapatan, tren rasio antara realisasi dan anggaran mengalami penurunan drastis, pada awal tahun anggaran sebesar 50% menurun hingga 0%, mengingat adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79 A yang berbunyi : Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor : 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal : 77 yang berbunyi : Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Perda

tersebut dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober 2015. Jadi sejak tanggal 15 Oktober 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tidak memungut biaya retribusi atas pelayanan penerbitan Administrasi Kependudukan (KK, KTP, Akta-Akta Catatan Sipil dan lain-lain).Namun Bidang Pendaftaran Penduduk tetap memberlakukan denda atas keterlambatan pelaporan pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Dari Tabel 2.8 diatas, dapat dilihat tren rasio dan rata-rata pertumbuhan dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan positif secara umum baik untuk anggaran maupun realisasi, ada beberapa kegiatan yang rata-rata pertumbuhannya negative, hal ini terjadi karena penurunan dalam penganggaran dan ada beberapa kegiatan yang rata-rata pertumbuhannya 0 (nol) dimana kegiatan tersebut hanya berlangsung selama satu kurun waktu saja, sehingga tidak dapat diukur rata-rata pertumbuhannya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan meliputi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan meliputi seluruh Kota Pekalongan dengan jumlah penduduk 317.839 jiwa (DKB Kemendagri per semester II tahun 2020). Untuk melayani jumlah penduduk tersebut sumber daya manusia/pegawai negeri sipil yang ada berjumlah 23 orang. Untuk itu dalam kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) dan kegiatan Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga berupa pelayanan e-KTP, KK dan Akta-akta Catatan Sipil kami mengalokasikan anggaran untuk tenaga non pns sejumlah 20 orang

sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan. Jumlah tersebut menyebar di 4 kecamatan. Kami juga telah mengajukan penambahan pegawai kepada Walikota Pekalongan tetapi sampai saat ini belum ada realisasi.

Dengan adanya kemajuan teknologi dan Sistem Informasi, Sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada sekarang dirasa masih kurang sesuai. Untuk itu perlu adanya bintek yang berkelanjutan dan penambahan sarana prasarana disesuaikan dengan kemajuan IPTEK untuk mendukung pelayanan yang optimal.

Dengan adanya amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pemerintah harus stelsel aktif dalam kepengurusan administrasi kependudukan, maka diperlukan adanya mobil pelayanan yang digunakan untuk jemput bola pelayanan. Untuk melayani seluruh penduduk Kota Pekalongan yang berjumlah 317.839 jiwa dan tersebar di 4 kecamatan, keberadaan mobil pelayanan dirasa perlu, dimana jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu bertambah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah :

Tantangan :

1. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, murah, tidak berbelit-belit dan prosedur yang sederhana.
2. Kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat.
3. Masih rendahnya kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan.
4. Ketergantungan blangko KTP-el dari Ditjen Dukcapil.
5. Perkembangan peraturan tentang Administrasi Kependudukan, sehingga harus selalu disosialisasikan ke masyarakat dan harus selalu dilaksanakannya bimbingan teknis kepada petugas pelayanan.
6. Belum optimalnya komitmen berbagai pihak untuk pemanfaatan data base kependudukan.
7. Ketergantungan jaringan SIAK dari Dirjen Dukcapil Kemendagri

Peluang :

1. Dukungan anggaran APBN dan APBD
2. Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online berstandar nasional dan link data sehingga dapat mengakses data seluruh penduduk untuk mempermudah pelayanan dan menghindari data kependudukan ganda.
3. Jaminan validitas data kependudukan untuk keperluan lintas sektor.
4. Kepastian hukum warganegara terkait dengan kepemilikan dokumen Kependudukan.
5. Tuntutan regulasi terkait Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara normatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Administrasi Kependudukan.

Hasil pemetaan masalah pokok tata kelola akan diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Data Tahun 2019 menunjukkan bahwa Indeks Reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2019 adalah 68,97. Masalah pokok ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi, yaitu: Belum optimalnya kualitas layanan publik (*Smart Governance*).

Selanjutnya, masalah pokok Tata Kelola Pemerintahan dijabarkan ke dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

TABEL 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya kualitas layanan publik (<i>Smart Governance</i>)	Belum optimalnya pelayanan publik administrasi kependudukan

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersaji dalam table berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan
1	2	3
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<p>Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk</p> <p>Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil</p> <p>Belum optimalnya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dindikcapil Kota Pekalongan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2021-2026, maka Visi Renstra Dindikcapil Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengadopsi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

VISI

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, adalah:

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan **Tahta Untuk Rakyat** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan social ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya. Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu brand image yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivasnya sangat rentan terdorong untuk meng-eksploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air

bersih yang ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi Transit Oriented Development (TOD). Pasca konstruksi Obyek Wisata Air Pasir Kencana di akhir tahun 2021 ini, Kota Pekalongan akan mempunyai wahana wisata baru yang akan sangat menarik kunjungan wisata. Hal ini akan menjadi pendorong bagi berkembangnya industry ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pada awal periode RPJMD ini, Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan

menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya - upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip good governance and clean government. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapantahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005- 2025. Oleh karena itu, pemaknaan sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera

menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan social dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJP-D Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal. Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi system pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan melaksanakan misi Walikota dan Wakil Walikota yang ketujuh, yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Instansi Terkait

a. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian vertikal bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Merujuk pada visi Kementerian Dalam Negeri untuk masa Tahun 2020-2024 yaitu **"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"**

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif. Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja

dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi sebagai berikut :

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Berangkat dari telaahan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri secara khusus yang berkaitan langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah :

Misi ke 2 dan ke 3 Kementerian Dalam Negeri yaitu :

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

b. Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi di Tingkat Provinsi yang membawahi dan mengkoordinir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Merujuk pada visi Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah yaitu

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

"Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dari misi diatas yang berkaitan dengan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah misi kedua, yaitu : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029. Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

Sedangkan telaahan terhadap kajian lingkungan hidup strategis dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan telaahan kedua dokumen tersebut, disamping juga telaahan Status Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka Permasalahan TPB dan Kondisi Lingkungan Hidup Yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah :

- Belum seluruh penduduk memiliki akta kelahiran
- Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan dan pengidetifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian

penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan .

Isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan antara lain :

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, yaitu: **"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"** dan melaksanakan Misi ketujuh, yaitu: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government " di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.

Sasaran:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja										
					2020 KONDISI AWAL	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026 KONDISI AKHIR			
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	79,44	79,63	79,88	80,13	80,38	80,63	80,88	80,88	87,00	87,00	
		1.2 Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	-	86,63	87,59	88,54	89,50	90,46	91,38	91,38	91,38	91,38	91,38

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran OPD akan dicapai. Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Strategi dan kebijakan DINDUKCAPIL Kota Pekalongan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil dan disepakati oleh DINDUKCAPIL guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

Strategi dan kebijakan DINDUKCAPIL Kota Pekalongan dapat dijabarkan dalam matrik atau Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

Visi : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

gfttn o	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi laporan capaian kinerja organisasi	Optimalisasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Optimalisasi administrasi keuangan perangkat daerah

		<p>1.2 Meningkatkan layanan administrasi kependudukan</p>	<p>Optimalisasi ketersediaan layanan administrasi kepegawalan, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>Optimalisasi pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</p> <p>Peningkatan kerjasama dengan OPD dalam pemanfaatan data kependudukan</p>	<p>Optimalisasi administrasi kepegawalan perangkat daerah</p> <p>Optimalisasi administrasi umum perangkat daerah</p> <p>Optimalisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Optimalisasi Penyajian data kependudukan</p> <p>Optimalisasi fasilitasi terkait pengelolaan informasi Adminduk</p> <p>Optimalisasi Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan</p>
--	--	---	---	--

	Optimalisasi pemeliharaan dan perbaikan arsip pencatatan sipil
Peningkatan capaian pelayanan pendaftaran penduduk	<p>Optimalisasi jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk</p> <p>Optimalisasi jumlah perekaman KTP-el dan jumlah penerbitan KK</p> <p>Optimalisasi kualitas dokumen audit dan surveillance ISO</p> <p>Optimalisasi cakupan kepemilikan KIA</p>
Peningkatan capaian pelayanan pencatatan sipil	<p>Optimalisasi jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil</p> <p>Optimalisasi jumlah penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan jumlah penerbitan Kutipan Akta Kematian</p>

				Optimalisasi jumlah penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan jumlah penerbitan Kutipan Akta Perceraian
--	--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka DINDUKCAPIL Kota Pekalongan menetapkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

Nama Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Pelayanan Pencatatan Sipil
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan

Non Urusan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel terlampir (Lampiran I).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan, atau ada kondisi yang menjadikan sasaran belum sesuai dengan yang direncanakan. Indikasi kinerja berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran yang ingin dicapai, sehingga diharapkan kinerja akan sejalan (*inline*) dengan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran yang ingin dicapai ini lazimnya telah dirumuskan dan ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Untuk bisa menggambarkan kondisi kinerja selama setahun, adakalanya indikasi kinerja ini dijabarkan dalam bentuk *trajectory* atau tahapan, misalnya bulanan, triwulanan, semesteran, sehingga akan bisa dimonitor capaian dalam rentang waktu setahun.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini diperoleh dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD. Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2020	TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	80,45	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00
2	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	-	86,63	87,59	88,54	89,50	90,46	91,38	91,38

Keterangan :

Dengan mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan, untuk :

- Sasaran 1 dengan indikator Nilai SAKIP OPD, tahun 2020 sebagai *baseline* nya berada pada Nilai SAKIP OPD 80,45, selanjutnya diharapkan pada akhir tahun 2026 bisa tercapai pada angka 87,00. Untuk lebih memastikan dan terukur nya capaian di akhir

tahun 2026, dibuatlah capaian *trajectory* tahunannya dengan target capaian naik rata-rata sebesar 1 setiap tahun pada periode setiap tahun perencanaan.

- Sasaran 2 dengan indikator Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan, diharapkan pada tahun 2021 bisa tercapai pada angka 86,63% hingga akhir tahun 2026 bisa tercapai pada angka 91,38%. Untuk lebih memastikan dan terukurnya capaian di akhir tahun 2026, dibuatlah capaian *trajectory* tahunannya dengan target capaian naik rata-rata sebesar 0,95% setiap tahun pada periode setiap tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah salah satu acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dedikasi, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan *stakeholder* lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di

dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Pekalongan, 24 September 2021
Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pekalongan



Drs. M U A D I, M.Si

NIP. 19651212 198603 1019

Tabel Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					745.716.000		870.311.000		780.168.000		789.206.000		821.669.000	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					338.568.000		328.428.000		330.857.000		336.070.000		351.135.000	
	Indikator Program :Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	0	0	81,77	338.568.000	83,53	328.428.000	85,3	330.857.000	87,07	336.070.000	88,75	351.135.000	88,75
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					338.568.000		328.428.000		330.857.000		336.070.000		351.135.000	
	Indikator Kegiatan : Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	dokumen	0	0	384336	338.568.000	394529	328.428.000	404772	330.857.000	415016	336.070.000	425259	351.135.000	425259
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk					271.068.000		260.928.000		263.357.000		268.570.000		283.635.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)	persen	0	95	95	131.700.000	95	131.700.000	95	131.700.000	95	136.870.000	95	143.635.000	95
	Indikator Sub Kegiatan : jumlah penerbitan KK	KK	0	25100	26200	139.368.000	28000	129.228.000	30200	131.657.000	32000	131.700.000	32000	140.000.000	173500

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen audit dan surveillance ISO	dokumen	0	1	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	5
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan					36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)	persen	0	50	55	36.000.000	60	36.000.000	65	36.000.000	70	36.000.000	75	36.000.000	75
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					284.850.000		274.137.000		275.826.000		279.699.000		291.975.000	
	Indikator Program :Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	0	0	93,4	284.850.000	93,55	274.137.000	93,7	275.826.000	93,85	279.699.000	94	291.975.000	94
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					284.850.000		274.137.000		275.826.000		279.699.000		291.975.000	
	Indikator Kegiatan : Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	dokumen	0	0	6981	284.850.000	6981	274.137.000	6981	275.826.000	6981	279.699.000	6981	291.975.000	41886
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas					272.850.000		262.137.000		263.826.000		267.699.000		279.975.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pelaporan Peristiwa Penting														
	Indikator Sub Kegiatan : Kepemilikan Akta Kelahiran (IKK Outcome)	persen	0	93	93	141.540.000	93	141.540.000	93	141.540.000	93	141.540.000	93	141.540.000	93
	Indikator Sub Kegiatan : Penerbitan akta kematian (IKK Output)	akta kematian	0	3225	3225	131.310.000	3225	120.597.000	3225	122.286.000	3225	126.159.000	3225	138.435.000	19350
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : penerbitan Akta Perkawinan (IKK Output)	akta perkawinan	0	50	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	250
	Indikator Sub Kegiatan : penerbitan Akta Perceraian (IKK Output)	akta perceraian	0	10	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	50
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					122.298.000		267.746.000		173.485.000		173.437.000		178.559.000	
	Indikator Program :Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	N/A	0	7	122.298.000	9	267.746.000	10	173.485.000	12	173.437.000	14	178.559.000	14

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					122.298.000		267.746.000		173.485.000		173.437.000		178.559.000	
	Indikator Kegiatan : Penyajian data kependudukan (IKK Output)	kali	N/A	0	2	122.298.000	2	267.746.000	2	173.485.000	2	173.437.000	2	178.559.000	2
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					23.928.000		176.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Rapat Koordinasi pelaporan Kependudukan yang dilaksanakan	kali	0	2	2	6.072.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	10
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan)	buku	0	96	96	17.856.000	96	20.000.000	96	20.000.000	96	20.000.000	96	20.000.000	480
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengadaan aplikasi pelayanan adminduk	aplikasi	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1
	Indikator Sub Kegiatan : jumlah pemeliharaan perangkat keras SIAK	unit	0	0	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	20

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					76.370.000		69.746.000		75.485.000		75.437.000		80.559.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan	kali	0	1	1	76.370.000	1	69.746.000	1	75.485.000	1	75.437.000	1	80.559.000	5
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan					22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah arsip Permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjiilidan)	berkas	0	5600	5600	6.172.000	5600	6.172.000	5600	6.172.000	5600	6.172.000	5600	6.172.000	28000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjiilidannya (berupa penjiilidan)	buku	0	112	112	6.122.000	112	6.122.000	112	6.122.000	112	6.122.000	112	6.122.000	560
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Fumigasi Arsip	kali	0	1	1	9.706.000	1	9.706.000	1	9.706.000	1	9.706.000	1	9.706.000	5
X.XX	Non Urusan					4.266.106.000		5.085.856.000		5.070.953.000		5.088.526.000		5.232.628.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR	
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.266.106.000		5.085.856.000		5.070.953.000		5.088.526.000		5.232.628.000		
	Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	0	100	3.047.775.000	100	3.302.909.000	100	3.321.018.000	100	3.357.809.000	100	3.470.339.000	100	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.092.000		31.878.000		31.194.000		37.919.000		31.219.000		
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	0	100	374.852.000	100	988.218.000	100	967.014.000	100	1.175.489.000	100	967.789.000	100	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.750.000		2.750.000		2.750.000		10.750.000		2.750.000		
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	dokumen	0	2	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.750.000	10	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8.000.000	0	0	1

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	dokumen	0	4	4	1.650.000	4	1.650.000	4	1.650.000	4	1.650.000	4	1.650.000	20
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.692.000		27.478.000		26.794.000		25.519.000		26.819.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen	0	4	4	1.466.000	4	1.466.000	4	1.466.000	4	1.466.000	4	1.466.000	20
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen	0	2	2	4.386.000	2	5.144.000	2	5.144.000	2	5.144.000	2	5.144.000	10
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	0	12	12	200.000	12	19.228.000	12	18.544.000	12	17.269.000	12	18.569.000	60

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	0	5	5	1.640.000	5	1.640.000	5	1.640.000	5	1.640.000	5	1.640.000	25
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.035.683.000		3.271.031.000		3.289.824.000		3.319.890.000		3.439.120.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	0	100	91.135.140.000	100	98.195.580.000	100	98.759.370.000	100	99.661.350.000	100	103.238.250.000	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.971.033.000		3.206.381.000		3.225.174.000		3.255.240.000		3.374.470.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	0	12	12	2.971.033.000	12	3.206.381.000	12	3.225.174.000	12	3.255.240.000	12	3.374.470.000	60
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	0	12	12	63.000.000	12	63.000.000	12	63.000.000	12	63.000.000	12	63.000.000	60

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	0	1	1	1.650.000	1	1.650.000	1	1.650.000	1	1.650.000	1	1.650.000	5
	Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	0	100	1.122.813.000	100	1.680.252.000	100	1.649.449.000	100	1.631.643.000	100	1.661.718.000	100
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					65.944.000		111.485.000		109.088.000		107.554.000		109.181.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	0	100	486.776.000	100	668.940.000	100	659.352.000	100	655.242.000	100	659.724.000	100
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik	kali	0	2	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	10

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					12.000.000		12.000.000		12.000.000		10.987.000		12.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya	orang	0	48	50	12.000.000	50	12.000.000	50	12.000.000	50	10.987.000	50	12.000.000	50
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					44.444.000		89.985.000		87.588.000		87.067.000		87.681.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pelaksanaan Sosialisasi melalui media massa dan elektronik	bulan	0	12	12	10.000.000	12	46.918.000	12	44.521.000	12	44.000.000	12	44.614.000	60
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan	kali	0	1	1	34.444.000	1	43.067.000	1	43.067.000	1	43.067.000	1	43.067.000	5
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					748.676.000		1.271.179.000		1.247.083.000		1.232.785.000		1.254.736.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	0	100	22.555.780.000	100	38.230.870.000	100	37.507.990.000	100	37.079.050.000	100	37.737.580.000	100

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	0	12	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	60
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					563.676.000		1.086.179.000		1.062.083.000		1.047.785.000		1.069.736.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	0	12	12	70.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	60
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor untuk Pelayanan Adminduk	bulan	0	12	12	367.676.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	60
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	0	13	5	100.000.000	12	480.179.000	12	456.083.000	12	441.785.000	12	463.736.000	53
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el yg	rim	0	492	492	26.000.000	492	26.000.000	492	26.000.000	492	26.000.000	492	26.000.000	2460

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	diadakan														
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	0	12	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	60
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	0	11	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	55
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	0	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	0	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	60
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	kali	0	33	34	100.000.000	35	100.000.000	36	100.000.000	37	100.000.000	38	100.000.000	180
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.193.000		297.588.000		293.278.000		291.304.000		297.801.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	0	100	9.050.697.000	100	8.743.152.000	100	8.618.162.000	100	8.560.916.000	100	8.749.329.000	100
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	0	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber					110.100.000		110.100.000		110.100.000		110.100.000		110.100.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Daya Air dan Listrik														
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	0	12	12	110.100.000	12	110.100.000	12	110.100.000	12	110.100.000	12	110.100.000	60
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					195.093.000		184.488.000		180.178.000		178.204.000		184.701.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor	bulan	0	12	12	43.100.000	12	43.100.000	12	43.100.000	12	43.100.000	12	43.100.000	60
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	orang/bulan	0	1	1	35.350.000	1	35.350.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	37.000.000	1
	Indikator Sub Kegiatan : jumlah bulan pelayanan adminduk (DAK)	bulan	0	12	12	116.643.000	12	106.038.000	12	101.078.000	12	99.104.000	12	104.601.000	60
	Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	0	100	95.518.000	100	102.695.000	100	100.486.000	100	99.074.000	100	100.571.000	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.518.000		102.695.000		100.486.000		99.074.000		100.571.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	0	100	2.845.540.000	100	3.057.850.000	100	2.991.580.000	100	2.949.220.000	100	2.994.130.000	100
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					55.500.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	0	16	16	55.500.000	16	56.000.000	16	56.000.000	16	56.000.000	16	56.000.000	16
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	0	3	3	20.000.000	3	23.000.000	3	23.000.000	3	23.000.000	3	23.000.000	3
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.018.000		23.695.000		21.486.000		20.074.000		21.571.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara	bulan	0	12	12	20.018.000	12	23.695.000	12	21.486.000	12	20.074.000	12	21.571.000	60

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor														

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.011.822.000		5.956.167.000		5.851.121.000		5.877.732.000		6.054.297.000	
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		745.716.000		870.311.000		780.168.000		789.206.000		821.669.000	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		338.568.000		328.428.000		330.857.000		336.070.000		351.135.000	
Indikator Program :Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk		338.568.000	338.568.000	328.428.000	328.428.000	330.857.000	330.857.000	336.070.000	336.070.000	351.135.000	351.135.000	Sama
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		338.568.000		328.428.000		330.857.000		336.070.000		351.135.000	
Indikator Kegiatan : Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk			338.568.000		328.428.000		330.857.000		336.070.000		351.135.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		271.068.000		260.928.000		263.357.000		268.570.000		283.635.000	
Indikator Sub Kegiatan : Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)			131.700.000		131.700.000		131.700.000		136.870.000		143.635.000	
Indikator Sub Kegiatan : jumlah penerbitan KK			139.368.000		129.228.000		131.657.000		131.700.000		140.000.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen audit dan surveillance ISO			31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)			36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		284.850.000		274.137.000		275.826.000		279.699.000		291.975.000	
Indikator Program : Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil		284.850.000	284.850.000	274.137.000	274.137.000	275.826.000	275.826.000	279.699.000	279.699.000	291.975.000	291.975.000	Sama
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		284.850.000		274.137.000		275.826.000		279.699.000		291.975.000	
Indikator Kegiatan : Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil			284.850.000		274.137.000		275.826.000		279.699.000		291.975.000	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		272.850.000		262.137.000		263.826.000		267.699.000		279.975.000	
Indikator Sub Kegiatan : Kepemilikan Akta Kelahiran (IKK Outcome)			141.540.000		141.540.000		141.540.000		141.540.000		141.540.000	
Indikator Sub Kegiatan : Penerbitan akta kematian (IKK Output)			131.310.000		120.597.000		122.286.000		126.159.000		138.435.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : penerbitan Akta Perkawinan (IKK Output)			6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
	Indikator Sub Kegiatan : penerbitan Akta Perceraian (IKK Output)		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		122.298.000		267.746.000		173.485.000		173.437.000		178.559.000	
	Indikator Program :Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	122.298.000	122.298.000	267.746.000	267.746.000	173.485.000	173.485.000	173.437.000	173.437.000	178.559.000	178.559.000	Sama
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		122.298.000		267.746.000		173.485.000		173.437.000		178.559.000	
	Indikator Kegiatan : Penyajian data kependudukan (IKK Output)		122.298.000		267.746.000		173.485.000		173.437.000		178.559.000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		23.928.000		176.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Rapat Koordinasi pelaporan Kependudukan yang dilaksanakan		6.072.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan)		17.856.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengadaan aplikasi pelayanan adminduk		0		100.000.000		0		0		0	
	Indikator Sub Kegiatan : jumlah pemeliharaan perangkat keras SIAK		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		76.370.000		69.746.000		75.485.000		75.437.000		80.559.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan			76.370.000		69.746.000		75.485.000		75.437.000		80.559.000	
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah arsip Permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjiilidan)			6.172.000		6.172.000		6.172.000		6.172.000		6.172.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjiilidannya (berupa penjiilidan)			6.122.000		6.122.000		6.122.000		6.122.000		6.122.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Fumigasi Arsip			9.706.000		9.706.000		9.706.000		9.706.000		9.706.000	
X.XX	Non Urusan		4.266.106.000		5.085.856.000		5.070.953.000		5.088.526.000		5.232.628.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.266.106.000		5.085.856.000		5.070.953.000		5.088.526.000		5.232.628.000	
Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		3.047.775.000	3.047.775.000	3.302.909.000	3.302.909.000	3.321.018.000	3.321.018.000	3.357.809.000	3.357.809.000	3.470.339.000	3.470.339.000	Sama
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.092.000		31.878.000		31.194.000		37.919.000		31.219.000	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			12.092.000		31.878.000		31.194.000		37.919.000		31.219.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.750.000		2.750.000		2.750.000		10.750.000		2.750.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun			2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun			0		0		0		8.000.000		0	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun			1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.692.000		27.478.000		26.794.000		25.519.000		26.819.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun			1.466.000		1.466.000		1.466.000		1.466.000		1.466.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)			4.386.000		5.144.000		5.144.000		5.144.000		5.144.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah			200.000		19.228.000		18.544.000		17.269.000		18.569.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun			1.640.000		1.640.000		1.640.000		1.640.000		1.640.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.035.683.000		3.271.031.000		3.289.824.000		3.319.890.000		3.439.120.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah			3.035.683.000		3.271.031.000		3.289.824.000		3.319.890.000		3.439.120.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.971.033.000		3.206.381.000		3.225.174.000		3.255.240.000		3.374.470.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			2.971.033.000		3.206.381.000		3.225.174.000		3.255.240.000		3.374.470.000	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan			63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun			1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		1.122.813.000	1.122.813.000	1.680.252.000	1.680.252.000	1.649.449.000	1.649.449.000	1.631.643.000	1.631.643.000	1.661.718.000	1.661.718.000	Sama
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		65.944.000		111.485.000		109.088.000		107.554.000		109.181.000	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah			65.944.000		111.485.000		109.088.000		107.554.000		109.181.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik			9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		12.000.000		12.000.000		12.000.000		10.987.000		12.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya			12.000.000		12.000.000		12.000.000		10.987.000		12.000.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		44.444.000		89.985.000		87.588.000		87.067.000		87.681.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pelaksanaan Sosialisasi melalui media massa dan elektronik			10.000.000		46.918.000		44.521.000		44.000.000		44.614.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan			34.444.000		43.067.000		43.067.000		43.067.000		43.067.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		748.676.000		1.271.179.000		1.247.083.000		1.232.785.000		1.254.736.000	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah			748.676.000		1.271.179.000		1.247.083.000		1.232.785.000		1.254.736.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		563.676.000		1.086.179.000		1.062.083.000		1.047.785.000		1.069.736.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos		70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor untuk Pelayanan Adminduk		367.676.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		100.000.000		480.179.000		456.083.000		441.785.000		463.736.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el yg diadakan		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		308.193.000		297.588.000		293.278.000		291.304.000		297.801.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		308.193.000		297.588.000		293.278.000		291.304.000		297.801.000	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		110.100.000		110.100.000		110.100.000		110.100.000		110.100.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		110.100.000		110.100.000		110.100.000		110.100.000		110.100.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		195.093.000		184.488.000		180.178.000		178.204.000		184.701.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor			43.100.000		43.100.000		43.100.000		43.100.000		43.100.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota			35.350.000		35.350.000		36.000.000		36.000.000		37.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : jumlah bulan pelayanan adminduk (DAK)			116.643.000		106.038.000		101.078.000		99.104.000		104.601.000	
Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		95.518.000	95.518.000	102.695.000	102.695.000	100.486.000	100.486.000	99.074.000	99.074.000	100.571.000	100.571.000	Sama
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95.518.000		102.695.000		100.486.000		99.074.000		100.571.000	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.518.000		102.695.000		100.486.000		99.074.000		100.571.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		55.500.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala			55.500.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		20.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala		20.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.018.000		23.695.000		21.486.000		20.074.000		21.571.000	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor		20.018.000		23.695.000		21.486.000		20.074.000		21.571.000	

Laporan Rekapitulasi Renstra 2021 - 2026 (Input di SIPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					745.716.000		870.311.000		780.168.000		789.206.000		821.669.000	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					338.568.000		328.428.000		330.857.000		336.070.000		351.135.000	
	Indikator Program :Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	0	80	81,77	338.568.000	83,53	328.428.000	85,3	330.857.000	87,07	336.070.000	88,75	351.135.000	88,75
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					338.568.000		328.428.000		330.857.000		336.070.000		351.135.000	
	Indikator Kegiatan : Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	dokumen	0	373518	384336	338.568.000	394529	328.428.000	404772	330.857.000	415016	336.070.000	425259	351.135.000	425259
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					284.850.000		274.137.000		275.826.000		279.699.000		291.975.000	
	Indikator Program :Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	0	93,25	93,4	284.850.000	93,55	274.137.000	93,7	275.826.000	93,85	279.699.000	94	291.975.000	94
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					284.850.000		274.137.000		275.826.000		279.699.000		291.975.000	
	Indikator Kegiatan : Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	dokumen	0	6981	6981	284.850.000	6981	274.137.000	6981	275.826.000	6981	279.699.000	6981	291.975.000	41886
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					122.298.000		267.746.000		173.485.000		173.437.000		178.559.000	
	Indikator Program :Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	N/A	5	7	122.298.000	9	267.746.000	10	173.485.000	12	173.437.000	14	178.559.000	14

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					122.298.000		267.746.000		173.485.000		173.437.000		178.559.000	
	Indikator Kegiatan : Penyajian data kependudukan (IKK Output)	kali	N/A	2	2	122.298.000	2	267.746.000	2	173.485.000	2	173.437.000	2	178.559.000	2
X.XX	Non Urusan					4.266.106.000		5.085.856.000		5.070.953.000		5.088.526.000		5.232.628.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.266.106.000		5.085.856.000		5.070.953.000		5.088.526.000		5.232.628.000	
	Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	3.047.775.000	100	3.302.909.000	100	3.321.018.000	100	3.357.809.000	100	3.470.339.000	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.092.000		31.878.000		31.194.000		37.919.000		31.219.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	12.092.000	100	31.878.000	100	31.194.000	100	37.919.000	100	31.219.000	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.035.683.000		3.271.031.000		3.289.824.000		3.319.890.000		3.439.120.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	3.035.683.000	100	3.271.031.000	100	3.289.824.000	100	3.319.890.000	100	3.439.120.000	100
	Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	1.122.813.000	100	1.680.252.000	100	1.649.449.000	100	1.631.643.000	100	1.661.718.000	100

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET / PAGU										KONDISI AKHIR
			TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					65.944.000		111.485.000		109.088.000		107.554.000		109.181.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	100	65.944.000	100	111.485.000	100	109.088.000	100	107.554.000	100	109.181.000	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					748.676.000		1.271.179.000		1.247.083.000		1.232.785.000		1.254.736.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	748.676.000	100	1.271.179.000	100	1.247.083.000	100	1.232.785.000	100	1.254.736.000	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.193.000		297.588.000		293.278.000		291.304.000		297.801.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	308.193.000	100	297.588.000	100	293.278.000	100	291.304.000	100	297.801.000	100
	Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	95.518.000	100	102.695.000	100	100.486.000	100	99.074.000	100	100.571.000	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.518.000		102.695.000		100.486.000		99.074.000		100.571.000	
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	95.518.000	100	102.695.000	100	100.486.000	100	99.074.000	100	100.571.000	100

BERITA ACARA DESK RENSTRA OPD TAHUN 2021 - 2026
DAN RENJA OPD TAHUN 2022

Pada tanggal : **2021-05-25** Telah dilakukan desk penajaman Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dipecah pagunya ke Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pembelian peralatan kebersihan kantor
2. Rincian atas target kinerja dan pagu sebagaimana terlampir

Selanjutnya hasil desk ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 dan Rancangan Akhir RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022

Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Petugas Desk

Siswanto, SE, MM

Endah Purbarini, SE, MM

Agus Arifin, ST

Aulia Nailufar, SE

Lampiran Berita Acara Desk Renstra OPD Tahun 2021 - 2026 dan Renja OPD Tahun 2022

Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE TUJUAN / KODE SASARAN	URAIAN TUJUAN / INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)		TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		KONDISI AKHIR		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,44		79,63		79,88		80,13		80,38		80,63		80,88		80,88		

KODE TUJUAN / KODE SASARAN	URAIAN TUJUAN / INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)		TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		KONDISI AKHIR		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																		
	Nilai SAKIP OPD	Indeks	80,45		82,00		83,00		84,00		85,00		86,00		87,00		87,00		
1.2	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan																		
	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	N/A		86,63		87,59		88,54		89,50		90,46		91,38		91,38		

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			0		5.011.822.000		5.956.167.000		5.851.121.000		5.877.732.000		6.054.297.000	
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			0		745.716.000		870.311.000		780.168.000		789.206.000		821.669.000	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			0		338.568.000		328.428.000		330.857.000		336.070.000		351.135.000	
	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	80	0	81,77	338.568.000	83,53	328.428.000	85,3	330.857.000	87,07	336.070.000	88,75	351.135.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			0		338.568.000		328.428.000		330.857.000		336.070.000		351.135.000	
	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	dokumen	373518	0	384336	338.568.000	394529	328.428.000	404772	330.857.000	415016	336.070.000	425259	351.135.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			0		271.068.000		260.928.000		263.357.000		268.570.000		283.635.000	
	Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)	persen	95	0	95,20	131.700.000	95,40	131.700.000	95,60	131.700.000	95,70	136.870.000	95,75	143.635.000	Desk_2405 Gaji tenaga kegiatan (naik 3% per tahun dan sdh include BPJS 100rb per bulan) a.n adib, asep, istmala, dadang, tumidi) DI_2712
	jumlah penerbitan KK	KK	25100	0	26200	139.368.000	28000	129.228.000	30200	131.657.000	32000	131.700.000	32000	140.000.000	Desk_2405 biaya operasional 2,5jt (Honor PPTK kasir + Penggandaan) dan gaji tenaga kegiatan (naik 3% per tahun dan sdh include BPJS 100rb per bulan) a.n Lulu, aji, ahmad saiful, anita, lucky
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			0		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah dokumen audit dan surveillance ISO	dokumen	1	0	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	Desk_2405 Tahun 2022 pagunya disamakan dengan pagu 2021
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			0		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	
	Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)	persen	50	0	55	36.000.000	60	36.000.000	65	36.000.000	70	36.000.000	75	36.000.000	Desk_2405 Tahun 2022 pagunya disamakan dengan pagu 2021 DI_2712
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			0		284.850.000		274.137.000		275.826.000		279.699.000		291.975.000	
	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	93,25	0	93,4	284.850.000	93,55	274.137.000	93,7	275.826.000	93,85	279.699.000	94	291.975.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			0		284.850.000		274.137.000		275.826.000		279.699.000		291.975.000	
	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	dokumen	6981	0	6981	284.850.000	6981	274.137.000	6981	275.826.000	6981	279.699.000	6981	291.975.000	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			0		272.850.000		262.137.000		263.826.000		267.699.000		279.975.000	
	Kepemilikan Akta Kelahiran (IKK Outcome)	persen	93	0	93,10	141.540.000	93,20	141.540.000	93,30	141.540.000	93,40	141.540.000	93,50	141.540.000	Desk_2405 Biaya operasional 4.340.000

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
															(honor kasir PPTK 6 bulan 3.450.000 dan penggandaan 120.000) sisanya gaji tenaga kegiatan (iclude kenaikan 3% per tahun dan BPJS 100rb per bulan) a.n Enyilia, naila, aslamul, ikatia, dan nur habibah)
	Penerbitan akta kematian (IKK Output)	akta kematian	3225	0	3225	131.310.000	3225	120.597.000	3225	122.286.000	3225	126.159.000	3225	138.435.000	Desk_2405 gaji tenaga kegiatan (naik 3% per tahun dan sdh include BPJS 100rb per bulan) a.n andry, rizqullah, diah, clara, muh. saifullah) DI_2712
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			0		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
	penerbitan Akta Perkawinan (IKK Output)	akta perkawinan	50	0	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	Desk_2405 honor PPTK kasir (3jt) dan banpot money 3 juta
	penerbitan Akta Perceraian (IKK Output)	akta perceraian	10	0	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	Desk_2405 Banpot money (6jt)
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			0		122.298.000		267.746.000		173.485.000		173.437.000		178.559.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	5	0	7	122.298.000	9	267.746.000	10	173.485.000	12	173.437.000	14	178.559.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0		122.298.000		267.746.000		173.485.000		173.437.000		178.559.000	
	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	kali	2	0	2	122.298.000	2	267.746.000	2	173.485.000	2	173.437.000	2	178.559.000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0		23.928.000		176.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000	
	Jumlah Rapat Koordinasi pelaporan Kependudukan yang dilaksanakan	kali	2	0	2	6.072.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan)	buku	96	0	96	17.856.000	96	20.000.000	96	20.000.000	96	20.000.000	96	20.000.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
	Jumlah pengadaan aplikasi pelayanan adminduk	aplikasi	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	
	jumlah pemeliharaan perangkat keras SIAK	unit	0	0	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0		76.370.000		69.746.000		75.485.000		75.437.000		80.559.000	
	Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan	kali	1	0	1	76.370.000	1	69.746.000	1	75.485.000	1	75.437.000	1	80.559.000	Desk_2405 Pagu Tahun 2022 disamakan dengan pagu tahun 2021
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			0		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	
	Jumlah arsip Permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjiilidan)	berkas	5600	0	5600	6.172.000	5600	6.172.000	5600	6.172.000	5600	6.172.000	5600	6.172.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
	Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjiilidan)	buku	112	0	112	6.122.000	112	6.122.000	112	6.122.000	112	6.122.000	112	6.122.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
	Jumlah Fumigasi Arsip	kali	1	0	1	9.706.000	1	9.706.000	1	9.706.000	1	9.706.000	1	9.706.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
X.XX	Non Urusan			0		4.266.106.000		5.085.856.000		5.070.953.000		5.088.526.000		5.232.628.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0		4.266.106.000		5.085.856.000		5.070.953.000		5.088.526.000		5.232.628.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	0	100	3.047.775.000	100	3.302.909.000	100	3.321.018.000	100	3.357.809.000	100	3.470.339.000	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		12.092.000		31.878.000		31.194.000		37.919.000		31.219.000	
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	0	100	374.852.000	100	988.218.000	100	967.014.000	100	1.175.489.000	100	967.789.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		2.750.000		2.750.000		2.750.000		10.750.000		2.750.000	
	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	dokumen	2	0	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.750.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8.000.000	0	0	Desk_2405 Penyusunan renstra hanya ada di tahun 2021 dan tahun 2025 dengan pagu 8jt
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun	dokumen	4	0	4	1.650.000	4	1.650.000	4	1.650.000	4	1.650.000	4	1.650.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		7.692.000		27.478.000		26.794.000		25.519.000		26.819.000	
	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen	4	0	4	1.466.000	4	1.466.000	4	1.466.000	4	1.466.000	4	1.466.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen	2	0	2	4.386.000	2	5.144.000	2	5.144.000	2	5.144.000	2	5.144.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	0	12	200.000	12	19.228.000	12	18.544.000	12	17.269.000	12	18.569.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	5	0	5	1.640.000	5	1.640.000	5	1.640.000	5	1.640.000	5	1.640.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0		3.035.683.000		3.271.031.000		3.289.824.000		3.319.890.000		3.439.120.000	
	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	0	100	91.135.140.000	100	98.195.580.000	100	98.759.370.000	100	99.661.350.000	100	103.238.250.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0		2.971.033.000		3.206.381.000		3.225.174.000		3.255.240.000		3.374.470.000	
	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	0	12	2.971.033.000	12	3.206.381.000	12	3.225.174.000	12	3.255.240.000	12	3.374.470.000	Penyesuaian Gaji Naik 5% per tahun
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000	
	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	0	12	63.000.000	12	63.000.000	12	63.000.000	12	63.000.000	12	63.000.000	Desk_2405 Penyesuaian Honor-honor mjd 12 bulan
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	1	0	1	1.650.000	1	1.650.000	1	1.650.000	1	1.650.000	1	1.650.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	0	100	1.122.813.000	100	1.680.252.000	100	1.649.449.000	100	1.631.643.000	100	1.661.718.000	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0		65.944.000		111.485.000		109.088.000		107.554.000		109.181.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	0	100	486.776.000	100	668.940.000	100	659.352.000	100	655.242.000	100	659.724.000	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik	kali	2	0	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0		12.000.000		12.000.000		12.000.000		10.987.000		12.000.000	
	Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya	orang	48	0	50	12.000.000	50	12.000.000	50	12.000.000	50	10.987.000	50	12.000.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0		44.444.000		89.985.000		87.588.000		87.067.000		87.681.000	
	Jumlah bulan pelaksanaan Sosialisasi melalui media massa dan elektronik	bulan	12	0	12	10.000.000	12	46.918.000	12	44.521.000	12	44.000.000	12	44.614.000	DI_0705 Penyesuaian Pagu DAK; Pagu DAK masih disamakan dengan APBD 2021

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Sosialisasi Admindak yang dilaksanakan	kali	1	0	1	34.444.000	1	43.067.000	1	43.067.000	1	43.067.000	1	43.067.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0		748.676.000		1.271.179.000		1.247.083.000		1.232.785.000		1.254.736.000	
	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	0	100	22.555.780.000	100	38.230.870.000	100	37.507.990.000	100	37.079.050.000	100	37.737.580.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	0	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	Desk_2405 tambahan utk komponen listrik pos dindukcapil di 4 kecamatan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		563.676.000		1.086.179.000		1.062.083.000		1.047.785.000		1.069.736.000	
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	0	12	70.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	Desk_2405 Rasionalisasi Anggaran
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor untuk Pelayanan Admindak	bulan	12	0	12	367.676.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	DI_0705 Penyesuaian Pagu DAK; Pagu DAK masih disamakan dengan APBD 2021

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	13	0	5	100.000.000	12	480.179.000	12	456.083.000	12	441.785.000	12	463.736.000	Desk_2405 Racionalisasi Anggaran
	Jumlah blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el yg diadakan	rim	492	0	492	26.000.000	492	26.000.000	492	26.000.000	492	26.000.000	492	26.000.000	DI_0705 Penyesuaian Pagu DAK; Pagu DAK masih disamakan dengan APBD 2021
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	0	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	Desk_2405 pecah pagu penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan kebersihan kantor
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11	0	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	0	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	0	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	kali	33	0	34	100.000.000	35	100.000.000	36	100.000.000	37	100.000.000	38	100.000.000	Desk_2405 Rasionalisasi Anggaran
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		308.193.000		297.588.000		293.278.000		291.304.000		297.801.000	
	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	0	100	9.050.697.000	100	8.743.152.000	100	8.618.162.000	100	8.560.916.000	100	8.749.329.000	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	0	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0		110.100.000		110.100.000		110.100.000		110.100.000		110.100.000	
	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	0	12	110.100.000	12	110.100.000	12	110.100.000	12	110.100.000	12	110.100.000	Desk_2405 pagu disesuaikan dengan pagu perubahan 2021
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0		195.093.000		184.488.000		180.178.000		178.204.000		184.701.000	
	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor	bulan	12	0	12	43.100.000	12	43.100.000	12	43.100.000	12	43.100.000	12	43.100.000	Desk_2405 untuk pembelian peralatan kebersihan 6 juta, sisanya gaji tenaga kegiatan 2 orang (Include kenaikan 3% per tahun dan BPJS 100 rb per bulan)
	Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	orang/bulan	1	0	1	35.350.000	1	35.350.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	37.000.000	Desk_2405 gaji tenaga kontrak SK Walikota 1 orang include kenaikan gaji pokok dan BPJS 3% per tahun
	jumlah bulan pelayanan adminduk (DAK)	bulan	12	0	12	116.643.000	12	106.038.000	12	101.078.000	12	99.104.000	12	104.601.000	DI_0705 Penyesuaian Pagu DAK; Pagu DAK masih disamakan dengan APBD 2021

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	0	100	95.518.000	100	102.695.000	100	100.486.000	100	99.074.000	100	100.571.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		95.518.000		102.695.000		100.486.000		99.074.000		100.571.000	
	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	0	100	2.845.540.000	100	3.057.850.000	100	2.991.580.000	100	2.949.220.000	100	2.994.130.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		55.500.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	16	0	16	55.500.000	16	56.000.000	16	56.000.000	16	56.000.000	16	56.000.000	Desk_2405 7,5 juta untuk servis 1 unit kendaraan yang belum teranggarkan di penetapan 2021, 9,5 juta untuk BBM
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0		20.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	3	0	3	20.000.000	3	23.000.000	3	23.000.000	3	23.000.000	3	23.000.000	Desk_2405 Pagu disamakan dengan pagu tahun 2021

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TH. 2021		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		CATATAN DESK
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		20.018.000		23.695.000		21.486.000		20.074.000		21.571.000	
	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	0	12	20.018.000	12	23.695.000	12	21.486.000	12	20.074.000	12	21.571.000	Desk_2405 tambahan 5 juta untuk service printer/komputer (e-KTP)